



Analisis Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Air Bersih Di Wilayah DKI Jakarta

Wihelmina Fauziah Rizka¹, Hasrianti²

^{1,2}Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 30, 2024

Revised June 10, 2024

Accepted June 20, 2024

Kata Kunci:

Infrastruktur,
Penyediaan Air Bersih,
Jakarta

Keywords:

Infrastructure,
Clean Water Supply,
Jakarta.

ABSTRAK

Sanitasi dan akses terhadap air bersih sangat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan Jakarta. Sebagai pusat populasi dan perekonomian yang berkembang pesat, Jakarta menghadapi kendala besar dalam hal penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, yang keduanya penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan terhadap air bersih dan sanitasi di negara-negara berkembang dan mencari solusi potensial. Dengan menggunakan data sekunder berupa tinjauan pustaka buku, makalah, jurnal ilmiah, internet, dan publikasi lainnya, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Selain menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan di masa depan, temuan penelitian ini juga menawarkan pemahaman menyeluruh tentang kemajuan Jakarta dalam penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi. Pemerintah dan masyarakat perlu terus bekerja sama untuk meningkatkan inisiatif pembangunan berkelanjutan guna mencapai keseimbangan antara permintaan akan pertumbuhan perkotaan yang cepat dan keberlanjutan pasokan air dan sanitasi berkualitas tinggi. Terkait air bersih dan sanitasi, Indonesia juga bisa mengacu pada enam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang memiliki enam target dan diperkirakan akan tercapai pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia memiliki 11 tujuan nasional terkait hal tersebut. Jakarta mungkin mengambil langkah-langkah untuk menjadi kota yang lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan di masa depan.

ABSTRACT

Sanitation and access to clean water are critical to Jakarta's sustainable growth. As the center of a rapidly growing population and economy, Jakarta faces major constraints in terms of providing clean water and sanitation facilities, both of which are essential to achieving sustainable growth. Therefore, the aim of this research is to identify barriers to clean water and sanitation in developing countries and explore potential solutions. By using secondary data in the form of literature reviews of books, papers, scientific journals, the internet and other publications, this research uses qualitative methodology. In addition to offering policy recommendations to support future sustainable development initiatives, the research findings also offer a comprehensive understanding of Jakarta's progress in providing clean water and sanitation facilities. Governments and communities need to continue working together to scale up sustainable development initiatives to achieve a balance between the demands of rapid urban growth and the sustainability of high-quality water and sanitation supplies. Regarding clean water and sanitation, Indonesia can also refer to the six Sustainable Development Goals (SDGs) which have six targets and are expected to be achieved by

2030. Apart from that, Indonesia has 11 national goals related to this. Jakarta may be taking steps to become a stronger, more resilient and sustainable city in the future.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Wihelmina Fauziah Rizka
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka,
Jakarta, Indonesia
Email: wihelminarizka29@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengembangan infrastruktur menjadi sangat penting dalam suatu daerah sebab memadainya infrastruktur dalam suatu daerah akan menjadikan masyarakat didalamnya lebih sejahtera. Adanya pengembangan infrastruktur yang memadai juga bisa menjadikan perekonomian daerah menjadi lebih baik sebab arus ekonomi lebih produktif. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur yang mana merupakan salah bentuk barang publik perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Siregar [1] mengungkapkan bahwa barang publik merupakan pengkonsumsian barang secara individual namun tidak menjadikan individu lainnya berkurang dalam mengkonsumsi barang yang sama. Dengan demikian, tidak terdapat pengecualian pada barang publik serta individu yang mengkonsumsinya tidak perlu mengeluarkan biaya. Berdasarkan teori barang publik menurut Pigou [2], penyediaan barang publik perlu dilakukan hingga kepuasan individu terhadap barang publik setara dengan tidak puasannya pemungutan pajak dalam menyediakan barang tersebut.

Salah satu bentuk barang publik yang wajib disediakan adalah air. Air merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam berkehidupan sehingga *supply* air akan semakin terbatas. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan air bersih oleh pemerintah sebagai bentuk pengadaan pelayanan publik di bidang penyediaan air bersih. Pemerintah DKI Jakarta telah menyelenggarakan pelayanan air bersih yang dilandasi pada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan tersebut menilai bahwa air bersih dan layak merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah melakukan perintah agar mempercepat PAM JAYA guna memenuhi kebutuhan tersebut. PAM JAYA juga diminta untuk meminimalisir pemakaian air tanah yang pada akhirnya mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan seperti kesehatan warga menurun, ekosistem kota terganggu, berpeluang adanya bencana alam.

Standart kuantitas air bersih menurut Pemerintah Daerah Jakarta yaitu dapat memenuhi kebutuhan konsumsi berupa minum, makan dan masak serta higienis minimal 60 liter per orang dalam satu hari. Secara kualitas, air bersih dikatakan berkualitas apabila setidaknya 1 kali

pengolahan untuk layak dikonsumsi sebagai air minum, serta sumber air terlindungi. Secara kontinuitas air bersih yang dimaksud yaitu air bersih dapat diperoleh saat dibutuhkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono et al. [3], standar kualitas air bersih terdiri pertama, dari jernih, tidak berbau dan tidak berwarna. Kedua, suhunya sebaiknya sejuk dan tidak panas. Ketiga, bebas unsur-unsur kimia yang berbahaya seperti besi (Fe), seng (Zn), raksa (Hg), dan mangan (Mn). Keempat, tidak mengandung unsur mikrobiologi yang membahayakan seperti *coli* dan *total coliforms*.

Fakta yang terjadi di lapangan, substitusi dari air tanah menjadi air minum dengan memakai jaringan pipa masih kurang disarankan. Adanya perilaku pemakaian air yang melebihi kapasitas dapat memicu masalah seperti keadaan lingkungan menurun, warga menjadi kurang sehat serta berpeluang memicu bencana alam. Akibatnya adalah ekosistem kota menjadi terganggu karena adanya cakupan layanan air minum pipa di Provinsi Daerah. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan wewenang kepada PAM Jaya agar mempercepat naiknya cakupan layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan SPAM.

Meninjau dari Laporan Sekretarian Jakarta Berketahanan pada tahun 2019, didapatkan informasi bahwa terjadi pencemaran pada air waduk di DKI Jakarta sebesar 97,5%. Pencemaran air sungai 88%, pencemaran air tanah serta seluruh air laut teluk DKI Jakarta sebesar 100%. Ditinjau dari data BPS tahun 2019, diketahui bahwa masyarakat yang mempunyai akses pada kelayakan sanitasi dan berkelanjutan hanya sebesar 89,93% rumah tangga. Penyebabnya adalah masyarakat DKI Jakarta masih menggunakan sumber air baku dari luar daerah sebesar 95%. Fenomena tersebut menggambarkan DKI Jakarta masih memiliki tata kelola kualitas dan akses air bersih yang masih buruk.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta dengan waktu riset yaitu bulan April 2024. Teknik pemerolehan data tersebut yaitu dengan melakukan wawancara dan *study literature* pada beberapa penelitian terdahulu, kebijakan dan laporan pemerintah DKI Jakarta yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur air bersih. Sumber data dari riset ini yaitu dari wawancara dan studi literature. Pada wawancara, informan yang akan diwawancarai adalah karyawan PDAM di DKI Jakarta. Sedangkan pada studi literature, data didapatkan dari buku, jurnal, laporan dan *website* pemerintah DKI Jakarta dan *website* lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini yaitu menggunakan analisis data interaktif menurut Miles et al. [4] yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam riset dari berbagai *literature* di internet. Setelah dikumpulkan, maka dilakukan reduksi data yaitu memilah data yang sesuai dengan fokus riset. Setelah mereduksi, maka dilakukan penyajian data yaitu menampilkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Terakhir adalah penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan temuan riset untuk menjawab fokus penelitian yang ditentukan [5].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Air Bersih di DKI Jakarta

Bersamaan dengan pembangunan kota non-fisik yang berkelanjutan, Jakarta masih mengupayakan pertumbuhan perkotaan yang kolaboratif. Selain memberikan landasan bagi masyarakat setempat untuk pertumbuhan di masa depan, pembangunan ini juga dilakukan untuk memberdayakan dan memberi manfaat bagi mereka saat ini. Sekalipun membangun perekonomian berkelanjutan memerlukan taktik yang baik, pembangunan kota tetap direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat [6]. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kota Jakarta telah menerapkan berbagai strategi dan inisiatif untuk mewujudkan pertumbuhan kota. Pemerintah Provinsi Kota Jakarta juga berupaya untuk melibatkan masyarakat pada tingkat sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat sebagai andalan Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bermitra dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) guna memfasilitasi hal tersebut [7].

Berdasarkan informasi yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta pada tahun 2018, hampir setiap keluarga di DKI Jakarta sudah menggunakan fasilitas sanitasi yang layak. Di Jakarta, tangki/saluran pembuangan akhir sampah (SPAL) digunakan oleh lebih dari 90% rumah sebagai sarana pembuangan kotoran manusia. Namun, rumah tangga masih membuang sampah akhirnya dengan cara yang tidak sehat—di sungai, kebun, lubang di tanah, dan tempat lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti diare, stunting, dan masalah lainnya sehingga berdampak sangat buruk [8].

Informasi di atas menunjukkan bahwa sumber air bersih hanyalah salah satu dari sekian banyak wilayah yang terkena dampak sanitasi yang baik. Sumber air minum merupakan salah satu keuntungan memiliki air bersih yang merupakan kebutuhan pokok sebuah rumah. Di setiap wilayah Jakarta, air kemasan merupakan sumber air minum yang paling umum. Karena sulitnya mendapatkan air minum di wilayah Kepulauan Seribu, rumah tangga di sanalah yang paling banyak menggunakan air minum kemasan. Kenyamanan dan aksesibilitas air kemasan berkontribusi terhadap adopsi air kemasan sebagai sumber air minum. Namun, masih banyak rumah yang memperoleh air minum dari air tanah [9].

Berdasarkan statistik di atas, penting untuk mempertimbangkan lingkungan air tanah karena banyak rumah tangga di Jakarta yang mengandalkan air tanah untuk air minum mereka. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah pemisahan yang aman dari sumber air. Ada batas aman sepuluh meter antara tempat penampungan sampah pemukiman dan sumber air. Jarak antara sumber air dan lokasi pembuangan masih kurang dari sepuluh meter di banyak rumah warga Jakarta. Kedekatan dengan rumah sehingga masyarakat tidak dapat memperhatikan pemisahan yang aman antara pipa saluran pembuangan, menjadi salah satu penyebab masalah ini. Satu-satunya tempat yang setiap rumah memiliki jarak pembuangan lebih besar dari batas yang direkomendasikan adalah di kawasan Kepulauan Seribu. Untuk mencegah masalah kesehatan akibat sanitasi yang tidak memadai, sangat penting untuk mencegah pencemaran sumber air oleh tempat pembuangan sampah [10].

Tabel 1. Akses terhadap Sanitasi di Jakarta Tahun 2021

No.	Kota	Jumlah Penduduk(Orang)	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akses Air Bersih (Orang)	Frekuensi
1.	Jakarta Utara	1.781.316	1.335.401	74,97%
2.	Jakarta Barat	2.528.065	1.791.920	70,88%
3.	Jakarta Tenggara	2.226.830	1.051.358	47,21%
4.	Jakarta Timur	2.805.337	1.875.085	66,84%
5.	Kepulauan Seribu	25.250	19.955	79%

Menurut data diatas, diketahui bahwa rata-rata tidak ada yang mendekati angka 90%. Ada beberapa permasalahan berbeda yang harus ditangani oleh penyedia pengelolaan air bersih di Jakarta. Hal ini mencakup standar pelayanan yang tidak memadai, tingginya tingkat kehilangan air, kurangnya pasokan air baku, meningkatnya permintaan, dan cakupan layanan yang relatif sedikit. mendukung pengurangan eksploitasi air tanah [11]

3.2 Hambatan Penyediaan Air Bersih di DKI Jakarta

Pencurian air yang meningkatkan angka kebocoran air (NRW) dan keluhan pelanggan terhadap layanan PAM JAYA atau Mitra Swasta hanyalah dua tantangan berat yang dihadapi kedua organisasi dalam menyediakan air bersih bagi warga DKI Jakarta. Keluhan Pelanggan PAM JAYA dan Mitra Swasta didahulukan. Pelanggan dan mitra swasta PAM JAYA biasanya menyuarkan keluhan mengenai kualitas air yang keruh, berbau busuk, dan tidak bersih; Mereka juga umumnya mengeluhkan tekanan udara yang tidak konsisten dan kenyataan bahwa air kadang-kadang mati di pagi hari, dan baru muncul sekitar pukul 23.00 malam. Keluhan umum dari klien adalah bahwa akun penagihan mereka "membengkak". Pelayanan PAM JAYA dan Mitra Swasta tentu saja membuat pelanggan kecewa. Biasanya mereka menggunakan surat kabar, website, media sosial, atau layanan pelanggan dari PAM JAYA dan Mitra Swasta untuk mengungkapkan ketidakpuasan pelanggannya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu karyawan PAM JAYA Bapak Sudibjo sebagai berikut:

“Hambatan pertama adanya keluhan dari masyarakat terhadap air yang mereka dapat kurang bagus yaitu keruh, kotor, baudi aliran airnya sangat buruk. Masyarakat banyak yang menuturkan kalo mereka bisa mengakses air di jam 23.00 sedangkan di pagi hari hingga malem air tidak mengalir. Jadi mereka kecewa atas layanan kami”. Berikutnya, pencurian air. Salah satu kendala penyediaan air kepada konsumen PAM JAYA adalah pencurian air. Pelanggan resmi PAM JAYA kesulitan mendapatkan air bersih akibat pencurian air. Pencurian air tidak hanya menimpa klien resmi tetapi juga PAM JAYA, mitra swasta, dan warga Provinsi DKI Jakarta. Terdapat 1.054 kejadian pencurian air yang dilakukan oleh pelanggan dan 725 titik sambungan ilegal non-pelanggan di wilayah Palyja hingga tahun 2014. Lima puluh lokasi sambungan gelap ditemukan di wilayah Aetra. Palyja rugi Rp2 miliar dan Aetra Rp6,9 miliar akibat pencurian air. Pemerintah telah menginstruksikan PAM JAYA dan Mitra Swasta untuk mengurangi tingkat kebocoran air hingga 35%18, namun DKI Jakarta telah kehilangan 40% pasokan airnya akibat pencurian ini, sehingga sulit untuk memantau tingkat kebocoran air (NRW) . Pencurian air biasanya terjadi untuk keperluan rumah tangga dan komersial. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Andi yang merupakan karyawan dari PAM JAYA yaitu sebagai berikut:

“Hambatannya banyak kasus masyarakat yang mencuri air sehingga banyak pihak yang rugi. Kasus ini menjadikan 40% air di Jakarta hilang sedangkan 35,18% air sedang diusahakan oleh pemerintah untuk didistribusikan dengan tepat. Tujuan mencurinya banyak, salah satunya karena masyarakat butuh untuk kehidupannya hingga untuk dijual kembali”.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang berarti terhadap jaringan air bersih yang menyuplai rumah-rumah warga, maka jaringan distribusi air masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah pertimbangan ketiga. Sehingga sering terjadi kebocoran dan lain sebagainya.

3.3 Strategi Pengembangan Air Bersih di DKI Jakarta

Menurut Anthony dan James [12], penyediaan fasilitas higienis dan air yang tidak terkontaminasi sangat penting untuk menjaga kehidupan. Agar kebutuhan masyarakat akan air asin dan air bersih tercukupi, kota-kota besar seperti Jakarta juga perlu mengambil langkah proaktif. Untuk menjamin keadilan sosial bagi warganya dan meningkatkan layanan, Pemprov DKI meluncurkan skema penyesuaian tarif otomatis (PTO) untuk air minum. Pasalnya, kebijakan ini menjaga tarif penggunaan minimum air di Kepulauan Seribu sama dengan tarif Pemkot Jakarta lainnya, sehingga tarif penggunaan minimum air yang ditawarkan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya menjadi lebih murah [12]

Tarif air di Kepulauan Seribu saat ini berkisar Rp1.050 per meter kubik untuk kelompok tarif sosial hingga Rp12.550 per meter kubik untuk kelompok tarif tertinggi pasca pemberlakuan PTO. Tujuan dari skema subsidi ini adalah untuk meningkatkan sanitasi, kesehatan, dan membatasi pengambilan air tanah, yang dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah, sekaligus mempercepat peluncuran layanan air bersih PAM Jaya di DKI Jakarta. Baik rencana internal maupun regional sudah ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kota Jakarta. Dari sisi strategi internal, upaya yang dilakukan meliputi pemanfaatan air secara efektif, desalinasi melalui penggunaan Water Treatment Plant (IPA) yang dilengkapi teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yang mampu mengubah air laut menjadi air berkualitas yang dapat diminum, serta akuisisi mobile IPA dan kapal tanker air. Sebagai bagian dari rencana daerah, Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya membangun SPAM baru di beberapa lokasi, termasuk SPAM Pesanggrahan dan SPAM Ciliwung, serta meningkatkan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang ada saat ini.

Sebagai bagian dari Jakarta Sewerage Development Project (JSDP), Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat bekerja sama membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Tujuan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan sanitasi yang memadai di Jakarta melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Warga kota Jakarta akan memperoleh sejumlah manfaat dari Program Pengembangan Saham Gabungan (JSDP), termasuk peningkatan akses dan standar layanan sanitasi yang memadai; pencegahan penyakit akibat pencemaran air permukaan dan air tanah; penyediaan sumber air baku dan air bersih alternatif; dan bantuan dalam menurunkan angka stunting.

Akibat penggunaan atau ekstraksi air tanah yang berlebihan, penurunan permukaan tanah di Kota Jakarta diperkirakan akan terus terjadi pada tahun 2023, dengan tingkat penurunan permukaan tanah sebesar 12 hingga 18 sentimeter per tahun. Proyek Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur, SPAM Juanda yang berfungsi memenuhi 2.000 liter air bersih per detik, dan Karian Serpong yang ditargetkan memenuhi 3.000 liter per detik merupakan tiga proyek yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah. penerapannya, menurut Basuki, untuk mengatasi permasalahan air bersih di Jakarta. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 28 juta penduduk Indonesia kekurangan akses terhadap air bersih, dan 8,6 juta rumah tangga masih buang air besar di luar karena kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai. Mayoritas penduduk Indonesia memperoleh air minum dari sungai dan air tanah, namun sumber daya alam tersebut saat ini tercemar oleh polusi industri dan rumah tangga. Air bersih dan sanitasi yang layak, pada kenyataannya, merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Pada tahun 2030, PBB berharap untuk mencapai akses universal terhadap air minum dan sanitasi, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di sektor lingkungan hidup. Hak asasi manusia yang mendasar inilah yang ingin diwujudkan secara setara oleh PBB [9].

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diharapkan dapat menjamin akses universal terhadap air bersih dan sanitasi berkelanjutan pada tahun 2030. Di Indonesia, hal ini disebut sebagai pembangunan sanitasi. Pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua merupakan tujuan dari enam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Delapan target telah dibuat, dengan 40 indikator digunakan untuk mengukur setiap target, dengan tujuan memiliki air bersih dan sanitasi yang layak pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini mencakup bidang-bidang berikut: penggunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air; menyediakan akses terhadap sanitasi yang baik; dan memastikan kualitas air dan limbah yang dibuang. Kebijakan, inisiatif, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok non-pemerintah menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut [10].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai hal ini, dapat dikatakan bahwa air bersih dan sanitasi sangat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan di Jakarta. Meskipun Jakarta berkembang pesat dan berubah menjadi pusat perekonomian utama, permasalahan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih tetap menjadi fokus utama. Penyediaan air bersih tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, namun pembangunan sosio-ekonomi juga bergantung padanya. Oleh karena itu, upaya bersama termasuk meningkatkan infrastruktur, memperluas aksesibilitas, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya praktik sanitasi yang baik diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Meskipun demikian, upaya Jakarta untuk menyediakan air bersih dan fasilitas sanitasi telah mengalami kemajuan. Penyakit ini bisa mendapatkan keuntungan dari tindakan proaktif dan rencana jangka panjang.

Untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan perkotaan yang cepat dan keberlanjutan sumber daya air dan sanitasi yang berkualitas tinggi, pemerintah dan masyarakat harus terus bekerja sama untuk meningkatkan upaya pembangunan berkelanjutan. Enam SDGs, yang mencakup enam target dan diperkirakan akan tercapai pada tahun 2030, juga menjadi pedoman bagi Indonesia terkait air bersih dan sanitasi. Selain itu, Indonesia memiliki 11 target nasional terkait isu ini. Kota Jakarta dapat menuju ke arah masa depan yang lebih berketahanan, berkelanjutan, dan berdaya. Berdasarkan temuan tersebut, penulis dapat berpesan kepada warga Jakarta dan seluruh Indonesia untuk secara konsisten mendukung dan mematuhi inisiatif

pemerintah terkait penyediaan air bersih dan sanitasi guna menjamin keberhasilan inisiatif tersebut dan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. tujuan nasional dan tujuan SDGs. Selain itu, diharapkan penulis di masa depan dapat meninjau tujuan yang telah dicapai, menilai seberapa baik target telah dilaksanakan, dan menelaah target baru yang mungkin muncul di masa depan terkait dengan ketentuan. fasilitas air bersih dan sanitasi.

REFERENSI

- [1] Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- [2] Pigou, A. C. (1923). Prices and Wages. *Economic Journal*, 33(130), 163–171.
- [3] Wicaksono, B., Mayasari, D., Setyanig, P. P., Iduwin, T., & Yuhanah, T. (2019). Edukasi Alat Penjernih Air Sederhana Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih. *Terang: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Menerangi Negeri*, 2(1).
- [4] Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- [5] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [6] Sofyan, A., Kusumahadi, K. S., Atoko, S. S. U., Tjamia, Y. R., & Setia, T. T. (2022). Kebutuhan Air Bersih Berbasis Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Di Kecamatan Tebet. *Jurnal Teknologi*, 14(2), 233–240.
- [7] Dwi, N. H., & Sari, A. P. (2022). *Jakarta, Ruang Pembangunan Kolaboratif dan Berkelanjutan*. Kompas.Com.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/13/12134291/jakarta-ruang-pembangunan-kolaboratif-dan-berkelanjutan?page=all>
- [8] BPS Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Persentase Rumah Tangga di Kota Jakarta Menurut Temporal Pembuangan*. BPS Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/>
- [9] Aditianata. (2019). Analisis Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Air Di Provinsi Jakarta. *Jurnal Inovasi*, 15(2), 56
- [10] Febriawati, L., Mellaty, R., & Widowati, T. (2020). Analisis Aksesibilitas Air Bersih Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Keluarga Di Dki Jakarta Clean Water Accessibility Analysis in Increasing Family Resilience in Dki Jakarta. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(2).
- [11] Samadi. (2016). *Pendidikan Lingkungan untuk Sistem Pemantauan dan Ketersediaan Air Bersih Penduduk*. Erlangga.
- [12] Anthony, J. C., & James, C. S. (2017). *Perencanaan Kota*. Erlangga